

**PENGARUH ALOKASI DANA DESA DAN PENGAWASAN
TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI
KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Manajemen
pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen
Universitas Tridinanti Palembang**



Disusun Oleh :

NAMA : SAZALI
NPM : 184041010

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG
TAHUN 2020**

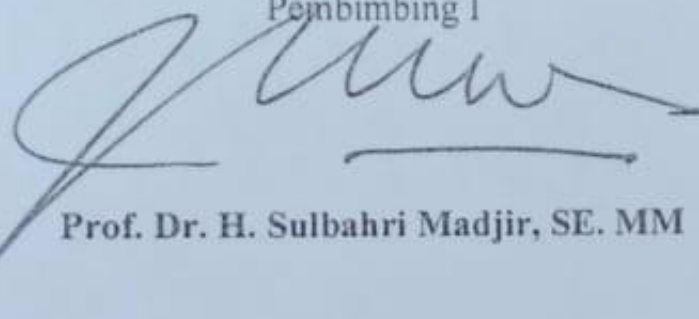
LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

PENGARUH ALOKASI DANA DESA DAN PENGAWASAN
TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI
KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN

Nama : SAZALI
NPM : 184041010

Menyetujui :

Tanggal,
Pembimbing I



Prof. Dr. H. Sulbahri Madjir, SE. MM

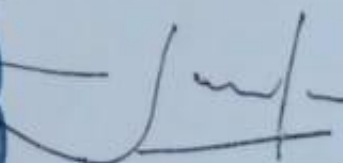
Tanggal, 2020
Pembimbing II



Dr. Msy. Mikial, SE, M.Si, AK. CA

Palembang, 2020

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Program Studi Magister Manajemen
Universitas Tridinanti Palembang



Dr. Hj. Tri Suyantiningsih, SE. MM

ABSTRAK

SAZALI, Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pengawasan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin dibawah bimbingan Prof. Dr. H. Sulbahri Madjir, SE. MM dan Dr. Msy. Mikial, SE, M.Si, AK. CA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pengawasan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin baik secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kades, Sekdes dan Ketua BPD dan jumlah anggota BPD pada masing-masing desa yang ada di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin. Dalam penelitian ini jumlah populasi adalah 93 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Sampling Jenuh* yaitu pengambilan sampel dilakukan secara keseluruhan dari jumlah populasi. Sejalan dengan pendapat tersebut diatas, maka dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan jumlah populasi sebesar 93 orang maka penulis mengambil seluruh dari jumlah populasi yaitu sebanyak 93 orang dengan rincian 33 orang sebagai sampel uji coba dan 60 orang sebagai sampel penelitian. Analisis data dilakukan dengan bantuan program *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Terdapat pengaruh yang signifikan Alokasi Dana Desa dan Pengawasan secara serentak terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kedua variabel bebas tersebut berjalan seiring dengan variabel terikat artinya makin tinggi Alokasi Dana Desa dan Pengawasan makin tinggi pula Pemberdayaan Masyarakat Desa. Korelasi (R) variabel Alokasi Dana Desa dan Pengawasan terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 0,645. Nilai koefisien determinasinya R Square sebesar 0,417 atau 41,7%. Terdapat pengaruh yang signifikan Alokasi Dana Desa secara parsial terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditunjukkan nilai sig t sebesar $0,000 < \alpha$ (0,05). Terdapat pengaruh yang signifikan Pengawasan secara parsial terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin yang ditunjukkan nilai sig t sebesar $0,039 < \alpha$ (0,05). Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,417, nilai tersebut dapat ditafsirkan bahwa besarnya persentase pengaruh antara variabel peningkatan Alokasi Dana Desa (X_1) Pengawasan (X_2) mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel Pemberdayaan Masyarakat Desa (Y). Dengan kata lain variabel peningkatan Alokasi Dana Desa (X_1) Pengawasan (X_2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Pemberdayaan Masyarakat Desa (Y) adalah sebesar 41,7%, sedangkan 58,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti tingkat pendidikan, kondisi ekonomi sosial dan politik, perspektif lingkungan, komunikasi serta sumber daya manusia

Dari hasil analisis dan pembahasan diatas dapat dikemukakan implikasi pada kebijakan manajerial hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan oleh manajemen dalam menentukan skala prioritas kebijakan yang harus dilakukan hasil penelitian ini

Upaya untuk meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dilakukan dengan meningkatkan Alokasi Dana Desa dan Pengawasan yang pada gilirannya dapat meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu :seperti dana yang diberikan dimaanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, program Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan harapan masyarakat desa dan dana bantuan program Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan secara merata kepada desa-desa, Upaya meningkatkan Pengawasan, seperti Pemerintah memiliki form untuk menilai hasil kerja, sehingga dapat mengetahui kesesuaian hasil dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, Pemerintah mengecek langsung progres setiap pekerjaan dari laporan koordinator pekerjaan serta Pemerintah memonitoring pekerjaan yang dilakukan.

Kata kunci : Alokasi Dana Desa, Pengawasan, Pemberdayaan Masyarakat Desa

ABSTRACT

SAZALI, *The Effect of Village Fund Allocation and Supervision on Empowering Village Communities in Tungkal Ilir District, Banyuasin Regency under the guidance of Prof. Dr. H. Sulbahri Madjir, SE. MM and Dr. Msy Mikial, SE, M.Sc, AK. CA.*

This study aims to determine and prove the Effect of Village Fund Allocation and Supervision Against Village Community Empowerment in the District of Tungkal Ilir, Banyuasin District, both partially and simultaneously. This research was conducted in Tungkal Ilir District, Banyuasin Regency. The population in this study were all village heads, village secretaries and chairpersons of the BPD and the number of BPD members in each village in the Tungkal Ilir District, Banyuasin Regency. In this study the population was 93 people. Sampling in this study uses the Saturated Sampling technique that is taking the sample as a whole from the total population. In line with the opinion above, then in this study taking into account the total population of 93 people, the authors take the entire population of 93 people with details of 33 people as a trial sample and 60 people as research samples. Data analysis was performed with the help of the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) program.

The results of this study indicate that, There is a significant influence of the Village Fund Allocation and Supervision simultaneously on the Empowerment of Village Communities. The two independent variables go hand in hand with the dependent variable meaning that the higher the Village Fund Allocation and Supervision the higher the Village Community Empowerment. Correlation (R) variable Village Fund Allocation and Monitoring of Empowerment of Village Communities amounted to 0.645. The coefficient of determination is R Square of 0.417 or 41.7%. There is a significant influence partially Village Fund Allocation on the Empowerment of Village Communities shown by the sig t value of $0,000 < \alpha (0.05)$. There is a significant influence Partial oversight on the Empowerment of Village Communities in the District of Tungkal Ilir, Banyuasin Regency, which is shown by the sig t value of $0.039 < \alpha (0.05)$. The coefficient of determination (R²) of 0.417, the value can be interpreted that the magnitude of the percentage of influence between the variable increase in Village Fund Allocation (X1) Supervision (X2) has a significant influence jointly on the variable Village Community Empowerment (Y). In other words the variable increase in Village Fund Allocation (X1) Supervision (X2) has a significant influence on the variable Village Community Empowerment (Y) of 41.7%, while 58.3% is influenced by other factors not included in the study these include levels of education, social and political economic conditions, environmental perspectives, communication and human resources

From the results of the analysis and discussion above, it can be stated that the implications for managerial policy research results can be used as a reference by management in determining the scale of policy priorities that must be carried out in this research. increasing the Empowerment of Village Communities, namely: such as funds provided are utilized in accordance with stipulated provisions, the Village Fund Allocation Program (ADD) is in line with the expectations of the village community and the Village Fund Allocation (ADD) assistance fund is given evenly to the villages, Efforts to increase Supervision, such as the Government has a form to assess the work, so that it can find out the suitability of the results with the work plan that has been set, the Government directly checks the progress of each work from the report of the work coordinator and the Government monitors the work done.

Keywords: Village Fund Allocation, Monitoring, Village Community Empowerment

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan dan Hidayah-Nya sehingga Tesis yang berjudul **“Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pengawasan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin”** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Magister Manajemen pada Universitas Tridianti Palembang Program Studi Magister Manajemen.

Penyelesaian Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah memberikan bantuan, baik langsung maupun tidak langsung, moril maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Nasional Tridianti Palembang Bapak Prof. Ir. H. Machmud Hasjim, MME.
2. Rektor Universitas Tridianti Palembang Ibu Dr. Ir. Hj. Manisah, MP
3. Direktur Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Tridianti Palembang Ibu Dr. Hj. Tri Suyantiningsih, SE. MM.
4. Bapak Prof. Dr. H. Sulbahri Madjir, SE. MM. selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Ibu Dr. Msy. Mikial, SE, M.Si, AK. CA. sekaligus selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Para dosen dan pihak-pihak lain yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penulisan Tesis ini.

7. Seluruh Keluarga Besar

Dan semua pihak yang telah membimbing, membantu dan mendorong penyelesaian Tesis ini. Saya mendo'akan semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas semua amal yang telah diberikan kepada saya baik langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari mungkin dalam Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu diharapkan tanggapan dan masukan dari berbagai pihak sebagai bahan perbaikan dengan harapan dan pada akhirnya Tesis ini dapat disajikan sebagai buah karya yang bermanfaat bagi masyarakat dibidang pendidikan.

Palembang, April 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
RIWAYAT HIDUP.....	xiii
SURAT PERNYATAAN.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Pembatasan Masalah	11
D. Perumusan Masalah	12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis	14
1. Pemberdayaan Masyarakat.....	14
2. Alokasi Dana Desa	21
3. Pengawasan	29
B. Hasil Penelitian Lain Yang Relevan	35
C. Kerangka Berpikir	37
D. Hipotesis Penelitian.....	40
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian	41

B. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.....	42
C. Rancangan Penelitian	43
D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel	43
E. Instrumen Penelitian	46
F. Teknik Analisis Data	48
G. Uji Hipotesis Statistik.....	55

BAB IV HASIL ANALISIS DAN INTERPRETASI

A. Instrumen Penelitian.....	57
B. Analisis Dekriptif	62
C. Analisis Statistik Inferensial.....	70
D. Uji Hipotesis Statistik	79
E. Interpretasi Hasil Penelitian.....	82
F. Pembahasan	84

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	94
B. Implikasi	95
C. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1	Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Gubernur (Ban-Gub) Tahun 2018.....	5
Tabel 2	Jadwal Penelitian.....	41
Tabel 3	Kisi-Kisi Instrumen Variabel Pemberdayaan Masyarakat	44
Tabel 4	Kisi-Kisi Instrumen Variabel Alokasi Dana Desa	45
Tabel 5	Kisi-Kisi Instrumen Variabel Pengawasan.....	46
Tabel 6	Skala Penafsiran Nilai Indikator.....	53
Tabel 7	Penafsiran Koefisien Korelasi	54
Tabel 8	Hasil SPSS Korelasi Variabel Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	58
Tabel 9	Hasil SPSS Korelasi Variabel Alokasi Dana Desa	59
Tabel 10	Hasil SPSS Korelasi Variabel Pengawasan.....	60
Tabel 11	Uji Reliabilitas untuk variabel Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	61
Tabel 12	Uji Reliabilitas untuk variabel Alokasi Dana Desa.....	61
Tabel 13	Uji Reliabilitas untuk variabel Pengawasan.....	62
Tabel 14	Data Deskriptif variabel Penelitian	63
Tabel 15	Hasil Nilai Rata-rata Skor jawab variabel Pemberdayaan Masyarakat Desa	67
Tabel 16	Hasil Nilai Rata-rata Skor jawab variabel Alokasi Dana Desa	68
Tabel 17	Hasil Nilai Rata-rata Skor jawab variabel Pengawasan	69
Tabel 18	Data Uji Normalitas.....	71
Tabel 19	Data Uji Homogenitas	72
Tabel 20	Hasil Uji Linear variabel Alokasi Dana Desa dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	73

Tabel 21	Hasil Uji Linear variabel Pengawasan dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	74
Tabel 22	Hasil Uji Multikolinearitas Variabel –variabel Bebas.....	74
Tabel 23	Hasil Uji Autokorelasi.....	75
Tabel 24	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	76
Tabel 25	Hasil Regresi Alokasi Dana Desa dan Pengawasan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	77
Tabel 26	Hasil Uji F Alokasi Dana Desa dan Pengawasan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	78
Tabel 27	Hasil Uji Korelasi Variabel Alokasi Dana Desa, Pengawasan terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 1	Kerangka Berpikir.....	39
Gambar 2	Grafik Histogram Variabel Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	64
Gambar 3	Grafik Histogram Variabel Alokasi Dana Desa.....	65
Gambar 4	Grafik Histogram Variabel Pengawasan.....	66

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAZALI
NPM : 184041010
Program Studi : Magister Manajemen Universitas Tridianti Palembang
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Manusia
Judul Tesis : Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pengawasan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Tesis yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) dari Program Pascasarjana Universitas Tridianti Palembang seluruhnya adalah hasil karya sendiri.
2. Apabila ada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain, akan saya tulis sumbernya dengan jelas, sesuai norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.
3. Jika di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis yang saya susun ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar Akademik Magister Manajemen (MM) yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dalam keadaan sadar dengan rasa tanggung jawab tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, April 2020
Yang menyatakan,



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Bagi desa otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten diserahkan pengaturannya kepada desa (Gaffar,2006 :42).

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah maka daerah diberikan otonom yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat,

serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata artinya, melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah sedangkan bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yang memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan.

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko 2002). Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Alokasi dana desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program desa. Salah satu tujuan dari alokasi dana desa adalah pengentasan kemiskinan. Akan tetapi seiring dengan besarnya jumlah dana desa, masalah kemiskinan masih sulit untuk diselesaikan.

Salah satu tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai pengentasan kemiskinan dan kesenjangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penggunaannya, 30 persen ADD digunakan untuk biaya operasional

penyelenggaraan pemerintah desa dan 70 persen digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat (Nurcholis, 2011:90). Sebagai bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pemerintah desa perlu mendapat supervisi dari level pemerintah di atasnya. Hal ini dikarenakan untuk kedepannya, jumlah Dana Desa yang akan diberikan ke desa akan semakin besar sementara kapasitas dan kapabilitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pengelolaan keuangan desa masih belum cukup memadai. Selain itu, keterlibatan masyarakat Berkenaan dengan dikurukannya Alokasi Dana Desa Dan Pengawasan diharapkan proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat ditingkatkan dan secara bersama ketimpangan pembangunan antar wilayah akan pula dapat dikurangi. Alokasi dana yang merata dan tepat sasaran serta pengelolaan sumber-sumber pendapatan secara optimal, efisien dan efektifitas dalam penggunaan anggaran belanja merupakan hal pokok yang harus selalu diprioritaskan. Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan keadilan distribusi, karena menciptakan kesejahteraan di masyarakat merupakan kewajiban seluruh agen ekonomi. Disamping itu, pemerintah juga berperan sebagai penjamin terciptanya distribusi yang adil serta menjadi fasilitator pembangunan manusia dan menciptakan kesejahteraan masyarakat (Pitri, 2018:54).

Penggunaan Alokasi Dana Desa juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pembedayaan

masyarakat desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk: a) Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan b) Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga c) Meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di desa.

Sampai dengan akhir tahun 2019, wilayah Kecamatan Tungkal Ilir terdiri dari 14 desa defenitif dipimpin kepala desa membawahi Dusun dan RT Dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa, Kaur, Kadus, dan Ketua RT yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa, Desa di Kecamatan Tungkal Ilir yaitu :

1. Teluk Tenggulang
2. Suka Mulia UPT I K.A.U
3. Suka Raja
4. Karang Anyar
5. Karang Mulya
6. Karang Asem
7. Marga Rahayu
8. Bumi Serdang
9. Sido Mulyo
10. Keluang
11. Bentayan
12. Panca Mulya Pertak II SP2
13. Suka Jaya Pertak III 1
14. Suka Karya

Kelancaran dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin sangat ditunjang oleh sumber perekonomian yang memadai. Adapun sumber dana yang menunjang perekonomian tersebut adalah berupa dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) diperoleh dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Adapun dana yang yang diperoleh dari Pemerintah

Kabupaten berupa dana bantuan yang dikenal dengan sebutan Alokasi Dana Desa dan bantuan dana yang berasal dari Pemerintah Provinsi disebut dengan Bantuan Gubernur (Ban-Gub).Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk : 1. Honor Perangkat Desa. 2. Honor BPD. 3. Biaya Perjalanan Dinas Kades Dan Ketua BPD. 4. ATK Pemerintah Desa dan BPD. 5. Biaya Operasional Pemangku Adat. 6. Biaya Operasional Hansip. Sedangkan Bantuan Gubernur (Ban-Gub) dipergunakan untuk : 1. Kegiatan TP PKK. 2. Kegiatan Posyandu. 3. Kegiatan Karang Taruna Pemuda dan Olah Raga. 4. Pembangunan Sara Produktif. 5. Biaya Operasional dan Administrasi Pelaporan. 6. Biaya Operasional dan Administrasi BPD. Program pembangunan di daerah menjadi prioritas utama dari Pemerintah,baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.Untuk itu Pemerintah Pusat dan Daerah membuat beberapa Program Pembangunan antara lain : PNPM,RIS PNPM,PKPM dan PPIP.Program tersebut telah berjalan sejak tahun 2007 sampai sekarang . Dari program – program tersebut sudah banyak pembangunan yang yang dihasilkan diantaranya : Jalan Desa dan Jembatan sarana dan prasarana di desa. Untuk mengetahui besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Gubernur (Ban-Gub) dirinci perdesa di Kecamatan Tungkal Ilir Tahun 2018 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1
Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Gubernur (Ban-Gub)
Tahun 2018

No.	Desa/Kelurahan	Sumber Dana		
		ADD (Rp)	Bantuan Gubernur (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Teluk Tenggulang	110.000.000	50.000.000	160.000.000
2.	Suka Mulya UPT I K.A.U	1.375.000.000	50.000.000	1.425.000.000
3.	Suka Raja	96.000.000	50.000.000	146.000.000

4.	Karang Ayar	96.000.000	50.000.000	146.000.000
5.	Karang Mulya	97.000.000	50.000.000	147.000.000
6.	Karang Asem	83.000.000	50.000.000	133.000.000
7.	Marga Rahayu	40.000.000	50.000.000	90.000.000
8.	Bumi Serdang	141.000.000	-	141.000.000
9.	Sido Mulyo	754.000.000	50.000.000	804.000.000
10.	Keluang	98.000.000	50.000.000	148.000.000
11.	Bentayan	207.000.000	50.000.000	257.000.000
12.	Panca Mulya Pertak II SP 2	89.000.000	50.000.000	139.000.000
13.	Suka Jaya Pertak III	339.000.000	50.000.000	389.000.000
14.	Suka Karya	89.000.000	50.000.000	139.000.000
Jumlah		3.614.000.000	650.000.000	4.264.000.000

Sumber : kantor camat Tungkal Ilir

Kecamatan Tungkal Ilir merupakan kecamatan dengan wilayah yang tidak begitu luas dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak dibanding dengan beberapa kecamatan lainnya di Kabupaten Banyuasin. Pada pertengahan tahun 2015 jumlah penduduk di kecamatan Tungkal Ilir sebanyak 24.828 jiwa atau naik 1,48 persen dibanding tahun 2013. Desa keluang merupakan desa dengan jumlah penduduk paling besar dibandingkan dengan desa lainnya. Jumlah penduduk di desa tersebut adalah sekitar 4.482 jiwa atau sekitar 18,05 persen dari total jumlah penduduk. Sedangkan desa dengan jumlah penduduk yang rendah adalah desa Panca Mulya Pertak II SP 2 dengan jumlah penduduk sekitar 339 jiwa atau sekitar 1,36 persen dari total jumlah penduduk di Kecamatan Tungkal Ilir.

Alokasi dana desa di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa seperti pembuatan pagar kantor desa, rehap gedung kantor desa, pelatihan, gaji perangkat desa dan kepala desa, tunjangan BPD pembuatan batas dusun, dan pembelian perlengkapan kantor desa. Sehingga dengan adanya pembangunan tersebut akan menambah pendapatan bagi

masyarakat di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin. Namun tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan suatu perubahan yang didanai oleh alokasi dana desa masih sangat rendah. Disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat masih sangat rendah.

Potensi kecurangan pengelolaan dana desa ini, perlu diantisipasi, dikendalikan melalui struktur dan sistem serta dicegah sehingga penggunaan dana desa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan. Seluruh instansi seharusnya bersama-sama bersinergi dalam rangka pengendalian dan pengawasan dana di Desa, baik Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pendamping Desa dan Pemerintah Kabupaten. Inspektorat sebagai OPD Pemerintah Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin yang bertugas melaksanakan pengawasan keuangan desa dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintah Desa. Beberapa potensi kecurangan khususnya dalam pengelolaan dana desa perlu diidentifikasi dan dipetakan bersama-sama untuk selanjutnya ditempuh langkah pengendalian untuk meminimalisir potensi tersebut.

Potensi masalah yang akan muncul dengan adanya ketidakselarasan ini adalah adanya tindakan kecurangan di Pemerintah Desa yang cukup tinggi. Kecurangan (fraud) adalah perbuatan curang yang dilakukan dengan berbagai cara secara licik dan bersifat menipu dan sering tidak disadari oleh korban yang dirugikan. Ada tiga jenis fraud yakni penyalahgunaan dana desa, kecurangan laporan keuangan dan korupsi. Kecurangan laporan keuangan nampak pada penyajian laporan keuangan (laporan APBDesa) yang dimanipulasi sehingga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Pengawasan aset desa dalam konteks pengawasan pengelolaan keuangan desa, beberapa pihak yang bersama-sama bersinergi dalam rangka melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa diantaranya yakni: Masyarakat, Masyarakat mempunyai peran terbesar dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa yakni Pemantauan Pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; BPD, BPD sebagai wakil masyarakat tingkat desa berperan dalam konteks pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55; Camat mendapat limpahan wewenang dari Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Selain itu camat dapat berperan dalam fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; Inspektorat Kabupaten Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan secara tegas bahwa Pemerintah Kabupaten yang dalam hal ini Inspektorat berperan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.

Selain itu inspektorat berperan juga dengan melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Wewenang ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 44 Ayat (2). Beberapa langkah kongkrit peran Inspektorat dalam pengawasan aset desa yakni melalui: Ikut berperan dalam tim penyusun Peraturan Bupati terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; ikut berperan dalam sosialisasi Peraturan Bupati terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; Berperan sebagai tim pendamping SISKEUDesa tingkat Kabupaten; Melakukan Pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa di tingkat

Kecamatan dan Kabupaten sebagai narasumber; Melakukan pemeriksaan regular/operasional pelaksanaan Pemerintahan Desa secara simultan; Menangani kasus aduan kepada Bupati terkait pengelolaan keuangan dan aset desa; Pemdampingan penyusunan laporan keuangan desa sebagai lampiran LKPD 2016. Titik kritis penyalahgunaan keuangan desa dan langkah pengendalian

Beberapa titik kritis penyalahgunaan keuangan desa yang perlu segera diambil langkah perbaikan antara lain: Siklus pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya dipatuhi oleh desa pengendaliannya dengan sosialisasi pendampingan bagi aparat desa, Transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa Masih Rendah langkah pengendaliannya dengan cara Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa serta adanya publikasi secara terbuka atas hasil pembangunan di desa, SDM pengelola Keuangan Desa belum memahami peraturan terkait pengelolaan aset desa pengendalian dengan cara Sosialisasi dan pendampingan bagi aparat Desa, Pertanggungjawaban APBDes dibuat sama dengan APBDesa dan tidak sesuai pembelanjaan riil pengendaliannya dengan cara Mengoptimalkan pemahaman bagi perangkat Desa bahwa pertanggungjawaban APBDesa adalah sesuai pembelanjaan di lapangan, Komponen Partisipasi, Swadaya dan Gotong Royong masyarakat atas pembangunan desa belum diakomodir dalam APBDesa pengendaliannya dengan cara Meningkatkan pemahaman dan kewajiban Kepala Desa beserta perangkat desa untuk menuangkan komponen Partisipasi, Swadaya dan Gotong Royong masyarakat dalam APBDesa; Penerimaan dan pengeluaran keuangan desa tidak semuanya melalui rekening kas desa pengendaliannya dengan cara Mengoptimalkan pemahaman bagi perangkat Desa bahwa Penerimaan dan

pengeluaran keuangan desa melalui rekening kas desa; Keuangan desa dipegang sepenuhnya oleh Kepala Desa, Bendahara desa tidak diperankan sesuai tugasnya pengendaliannya dengan cara Mengembalikan dan mengoptimalkan peran masing-masing perangkat desa sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Pemberdayaan masyarakat desa belum efektif terlihat dari ketidakmampuan untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing

Selain itu yang menjadi permasalahan yaitu pemerintah Desa kurang terbuka dengan sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa, sehingga masyarakat kurang tahu mengenai proses pengelolaannya. Masalah yang timbul dalam hal ini yaitu tentang sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa yang kurang di pahami oleh pihak-pihak contohnya masyarakat dalam melaksanakan sistem pemerintahan didesa.

Dari penjelasan diatas, maka untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pengawasan terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dilakukan melalui penelitian dengan judul **“Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pengawasan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin”**.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai uraian pada latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah yang mempunyai Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pengawasan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin antara lain :

1. Kurang terbuka dengan sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa

2. Masih Rendah langkah pengendaliannya dengan cara Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa serta adanya publikasi secara terbuka atas hasil pembangunan di desa
3. SDM pengelola Keuangan Desa belum memahami peraturan terkait pengelolaan aset desa pengendalian dengan cara Sosialisasi dan pendampingan bagi aparat Desa
4. Pemberdayaan masyarakat desa belum efektif terlihat dari ketidakmampuan untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing
5. Pertanggungjawaban APBDes dibuat sama dengan APBDesa dan tidak sesuai pembelanjaan riil pengendaliannya dengan cara Mengoptimalkan pemahaman bagi perangkat Desa bahwa pertanggungjawaban APBDesa adalah sesuai pembelanjaan di lapangan
6. Bendahara desa tidak diperankan sesuai tugasnya pengendaliannya dengan cara Mengembalikan dan mengoptimalkan peran masing-masing perangkat desa sesuai tugas dan fungsinya masing-masing

C. Pembatasan Masalah

Disebabkan adanya keterbatasan-keterbatasan dalam diri penulis baik menyangkut kemampuan, waktu, maupun dana dan agar penelitian ini lebih terfokus, maka dari beberapa masalah yang telah teridentifikasi diatas penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti hanya pada Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pengawasan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin.

D. Perumusan Masalah

Adapun masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ada Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pengawasan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin secara simultan?
2. Apakah ada Pengaruh Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin?
3. Apakah ada Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pengawasan Di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diinginkan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis, mengetahui dan membuktikan pengaruh :

- (a) Alokasi Dana Desa Dan Pengawasan secara bersama-sama Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin?
- (b) Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin?
- (c) Pengawasan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin?

2. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan hasil-hasil yang didapat akan ada manfaatnya bagi :

- (a) Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pengawasan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin.
- (b) Sebagai sumbangan bagi Pemerintah Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin untuk lebih memperhatikan Alokasi Dana Desa Dan Pengawasan dalam mengurangi Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin.
- (c) Secara teoritis :
 - 1) Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan bidang Manajemen Sumber Daya Manusia yang terkait dengan masalah Alokasi Dana Desa Dan Pengawasan dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - 2) Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi bagi pihak yang ingin melakukan kajian lebih lanjut.
 - 3) Sebagai salah satu input atau masukan Pemerintah Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan Gaffar, 2006, *Paradigma Baru Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Jakarta, Citra Aditya Bakti
- Anwas, Oos, M 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani Ambar Teguh. (2014). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media.
- Chatarina Rusmiyati. (2011). *Pemberdayaan Remaja untuk Sekolah*. Yogyakarta: B2P3KS.
- Edi Suharto, 2013, *Membangun masyarakat memberdayakan masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama
- Ginting S, Charisma Kuriata, Irsad Lubis, Dan Kasyful Mahalli. 2013. "Pembangunan Manusia Di Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya". *Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah*, Vol.4, No.1, Agustus 2013. Hal 17-24
- Gustafsson, Asghar Zaidi and Eva Franzen. 2011. *Financial Poverty. International Journal Of Social Welfare*, Vol. 16, Issue 1, Pages:67-90, ISSN:1369- 6866.
- George R. Terry dalam Burhanuddin, 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Siswoyo Haryono, 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Unanti, Palembang.
- Hudiyanto. 2014. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Lingkar Media
- Juanda. 2013. *Metodologi Penelitian*. Gunung Agung, Jakarta.
- Mardiasmo. 2012. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari. 2012. *Instrument Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Santoso, Singgih. 2014. *SPSS Statistik Multivariat*. Elik Media Komputindo, Jakarta
- Suparjan & Hempri S. (2013). *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media

- Suhendra, 2013. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sumodiningrat, Gunawan, (2011). *Memberdayakan Masyarakat: Kumpulan Makalah Tentang Inpres Desa Tertinggal*, Jakarta: Penakencana Nusadwipa.
- Sedarmayanti. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Putra dan Sri Budhi. 2015. *Efektivitas Dan Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mpd) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Sasaran Di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Hal: 183-196.
- Pitri, Savarita. 2018. *Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung.
- Wasistiono, Sadu. 2013. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung. Fokusmedia;
- Winarno, B. 2015. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta. CAPS.
- Young, 2012. *Metodologi Penelitian*. PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta